



**PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jl. Ahmad Yani No.133 Sidikalang,

Kab. Dairi - Sumatera Utara

Telp/Fax : (0627) 21053.

M E N D E

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025. Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang juga sebagai evaluasi apa yang telah dilaksanakan dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan sesuai Tupoksi di masing-masing bidang, baik bidang Teknis maupun dibidang administrasi umum.

Dalam penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini kami sadar bahwa masih jauh dari sempurna seperti apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, namun demikian harapan kami semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi perkembangan Pengadilan Tingkat pertama.

Sidikalang, 27 Januari 2025

KEPUKAH PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang	23
- Laporan Keadaan Perkara Pidana	23
- Laporan Keadaan Perkara Perdata	24
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	25
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	26
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	27
B. Penyelesaian Perkara	28
- Jumlah Sisa Perkara Yang Putus.....	28
- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	28
- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi , PK	28
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan RJ... ..	28
- Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi.....	28
- Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	28
- Jumlah Perkara Anak Yang Menggunakan E-Court	28
- Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu).....	29
- Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).....	29
C. Program Prioritas Nasional.....	29
- Posbakum	29
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	29
- Perkara Prodeo	29
Bab III. Sumber Daya Manusia.....	31
A. Mutasi	33
B. Promosi	35
C. Pensiun.....	35
D. Diklat	35
Bab IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi.....	38
A. Pengelolaan Keuangan	38
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	38
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	41
- Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Sidikalang	45
- Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Sidikalang	45
- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sidikalang	46
Bab V. Peningkatan Pelayanan Publik	47
A. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Pengadilan.....	47
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	47
C. Inovasi Pelayanan Publik	48
Bab VI. Pengawasan	50
A. Internal	50
B. Evaluasi	54
Bab VII. Penutup	60
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi	60

BABI

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II meliputi seluruh wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan tahun 2025 tersebut berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.

Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara

Pada tahun 2025 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Di tahun 2019, manajemen perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin disempurnakan dengan terus melakukan perbaikan Update. Pada Triwulan IV di tahun 2018 Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi Pendaftaran Perkara Online yang disebut E-Court kemudian di tahun 2019 disempurnakan dengan E-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu dan diintegrasikan dengan aplikasi SIPP. Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II sampai saat ini telah berhasil menerapkan aplikasi tersebut tersebut untuk para Advokat dan Penegak Hukum.

3. Keterbukaan informasi

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II pada tahun 2025 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan meliputi : peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>,

peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan Website, dan penerapan pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) di Pengadilan.

4. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 7,8,9 Tahun 2016

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II selalu melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

VISI dan MISI

Visi dan misi dari Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II adalah sebagai berikut:

1. VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG“

2. MISI

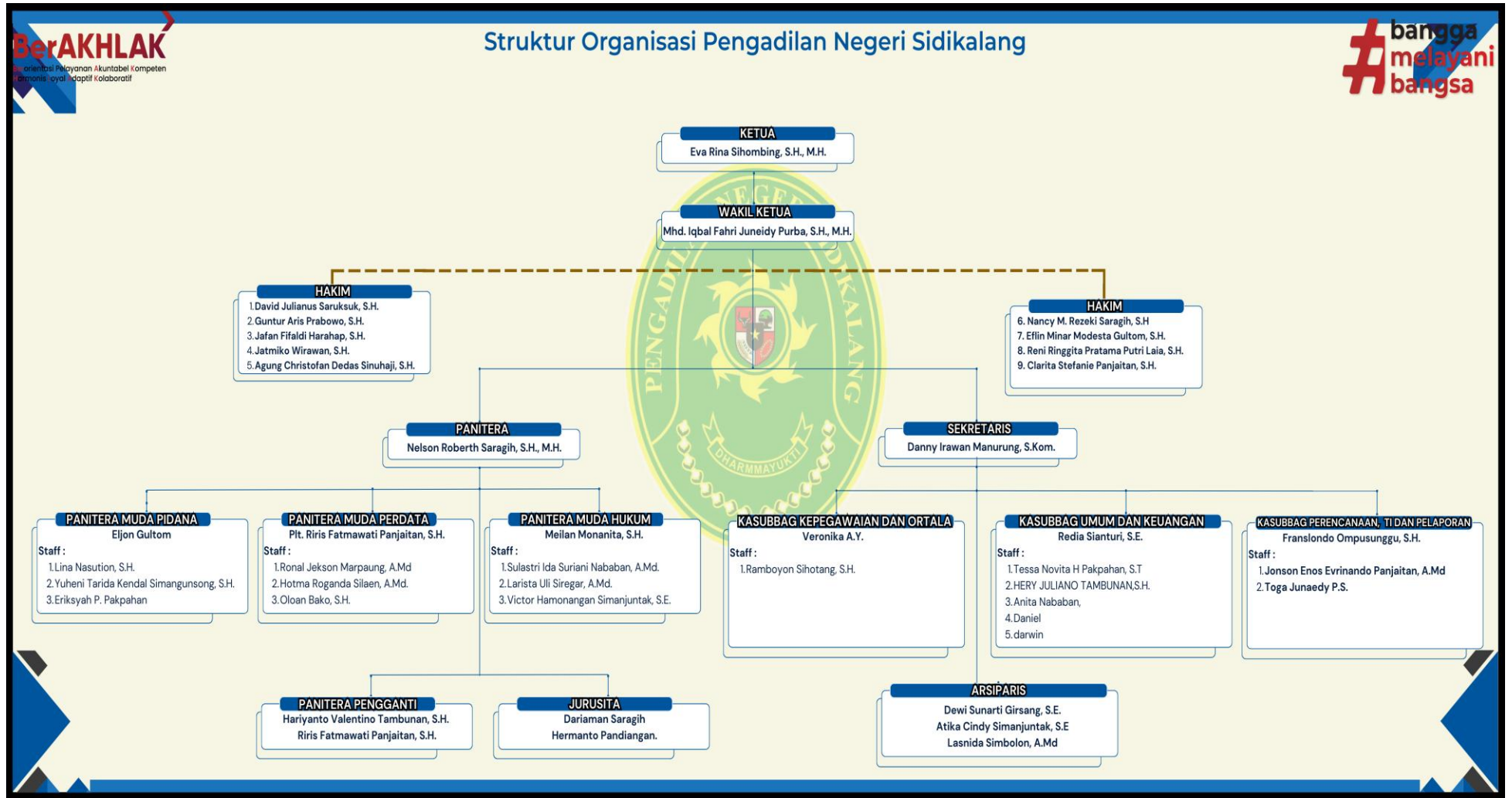
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II

MOTTO

M E N D E

Mandiri, Etis, Nyaman, Dedikasi dan Elok

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)



KETUA :

Pimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II saat ini adalah EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 adapun rincian tugas pokok dan fungsi Pimpinan adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, menetapkan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasub Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, Kasub Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita, Arsiparis serta seluruh Staf dan Tenaga Honorar di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim
2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita/Jurusita Pengganti

WAKIL KETUA :

Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II saat ini adalah MHD. IQBAL FAHRY JUNAEDY PURBA, S.H.,M.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, adapun rincian tugas pokok dan fungsi Pimpinan (Wakil Ketua) adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya. Serta melaksanakan tugas-tugas lainnya menurut undang-undang yang diwajibkannya kepadanya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

HAKIM :

Adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan Perdata yang di ajukan mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan kebenaran materil serta membantu bidang pengawasandi masing-masing bidang.

Hakim di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II berjumlah 8 (Delapan) orang,

Adapun Nama-nama Hakim adalah sebagai berikut :

1. Eva Rina Sihombing, S.H.,M.H. (Ketua)
2. Mhd. Iqbal Fahry Junaedy Purba, S.H., M.H. (Wakil Ketua)
3. Nancy M. Rezeki Saragih, S.H. (Hakim)
4. David Julianus Saruksuk, S.H. (Hakim)
5. Reni Ringgita Pratama Putri Laia, S.H. (Hakim)
6. Jatmiko Wirawan, S.H. (Hakim)
7. Agung Christofan Dedas Sinuhaji, S.H. (Hakim)
8. Eflin Minar Modesta Gultom, S.H. (Hakim)
9. Guntur Aris Prabowo, S.H. (Hakim)
10. Jafan Fifaldi Harahap, S.H. (Hakim)
11. Clarita Stefanie Panjaitan, S.H. (Hakim)

Fungsi

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara;
2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan;
3. Pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

PANITERA

Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dijabat oleh NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor: 1810/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2023, tanggal 27 November 2023. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Panitera sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 | Pengadilan Negeri Sidikalang

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyelenggaraan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti, membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, menyusun berita acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, membuat semua daftar perkara masuk di kepaniteraan, membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat akta-akta yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera, mengirimkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, melaksanakan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua dan menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.

Fungsi

1. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti;
2. Pelaksanaan membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya persidangan, menyusun berita acara persidangan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan;
3. Pelaksanaan pendaftaran perkara masuk di kepaniteraan, membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat akta-akta yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera;
4. Pelaksanaan pengiriman berkas yang dimohon banding, kasasi dan peninjauan kembali, melaksanakan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua dan menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.

SEKRETARIS:

Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II ditetapkan adanya Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1040/SEK/KP.I/SK/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi Sekretaris sebagai berikut:

Tugas Pokok:

1. Melakukan penyelenggaraan administrasi umum;
2. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur kesekretariatan;
3. Melaksanakan pembuatan laporan administrasi umum;
4. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
5. Bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
6. Mengatur jalannya surat sesuai dengan maksud surat berdasarkan ketentuan berlaku;
7. Melaksanakan tugas sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang dalam pengelolaan DIPA;
8. Memberikan arahan terhadap penyusunan RKA-KL;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan.

PANITERA PENGGANTI :

Membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan, menyelesaikan perkara Membuat minutasi perkara.

PANITERA MUDA HUKUM :

Panitera Muda Hukum di isi oleh MEILAN MONANITA, S.H.dan tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
2. Pelaksana pengumpul, pengolah dan pengkaji data statistik perkara, penyusun laporan perkara dan penyimpanan arsip berkas perkara;
3. Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji serta menyajikan data penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pimpinan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

PANITERA MUDA PERDATA :

Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas kepaniteraan di bidang perdata antara lain, mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan berkas perdata, keuangan perkara, PNBP, dan lain-lain. Jabatan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II saat ini masih kosong akan tetapi ditunjuk Plt. Yaitu Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

PANITERA MUDA PIDANA :

Melaksanakan dan mengkoordinir tugas-tugas kepaniteraan di bidang pidana antara lain, penerimaan berkas pidana, register pidana, dan lain –lain. Jabatan Panitera Muda pidana pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II di isi oleh ELJON GULTOM.

KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan dijabat oleh FRANSLONDO OMPUSUNGGU, S.H. dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II di isi oleh VERONICA ANISA YANUARI, dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas

II diisi oleh REDIA SIANTURI, S.E dengan tugas – tugas sebagaiberikut : Tugas –

Tugas Mengenai Umum sebagai berikut :

- Menerima surat –surat masuk sesuai dengan kartu kendali;
- Menginventaris barang-barang kantor;
- Melaksanakan SIMAK BMN;
- Membuat usulan belanja kantor;
- Mengurus BBM Kendaraan, Gedung kantor, Rumah Dinas,Tempat Sidang;
- Membuat surat –surat Umum;
- Mengarsipkan surat- surat Umum;
- Mengurus /Inventaris Pustaka;

Tugas – Tugas Mengenai Keuangan sebagai berikut :

- Membuat RKAL;
- Membuat Daftar gaji;
- Mengajukan gaji atau rekon pertanggung jawaban;
- Membukukan keuangan;
- Mengarsipkan surat –surat keuangan;
- Membuat Laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga memiliki Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 (Sembilan) orang adalah sebagai berikut :

1. Heri J. Tambunan (**Penata Layanan Operasioanal**)
2. Ramboyon Sitohang (**Penata Layanan Operasioanal**)
3. Oloan Bako (**Penata Layanan Operasioanal**)
4. Viktor Simanjutak (**Penata Layanan Operasioanal**)
5. Anita Nababan (**Pengelola Data Informasi**)
6. Monika Nainggolan (**Operator Layanan Operasional**)
7. Darwin R Silalahi (**Operator Layanan Operasional**)
8. Daniel (**Operator Layanan Operasional**)
9. Toga Junaedy P.S. (**Operator Layanan Operasional**).

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
	PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II			
I	TEKNIS			
1	Ketua	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Menerima berkas perkara masuk 2. S.O.P Meneliti berkas perkara masuk 3. S.O.P Menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa 4. S.O.P Mencatat pada register penunjukan Majelis Hakim 5. S.O.P Menerima berkas permohonan eksekusi dari Kepaniteraan Perdata 6. S.O.P Meneliti berkas permohonan eksekusi 7. S.O.P Mengeluarkan penetapan <i>Aanmaning</i> 8. S.O.P Pelaksanaan <i>Aanmaning</i> 9. S.O.P Menerima dan mempelajari laporan pelaksanaan <i>Aanmaning</i> 10. S.O.P Penetapan Sita Eksekusi 11. S.O.P Menerima berkas permohonan eksekusi dan resume dari Panitera/Wakil Panitera 12. S.O.P Meneliti dan mempelajari berkas permohonan dan resume 13. S.O.P Mengeluarkan penetapan <i>Aanmaning</i> 14. S.O.P Pelaksanaan <i>Aanmaning</i> 15. S.O.P Menerima dan mempelajari laporan pelaksanaan <i>Aanmaning</i> 16. S.O.P Penetapan Sita Eksekusi 	

2	Wakil Ketua	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Menerima berkas perkara Permohonan 2. S.O.P Meneliti berkas perkara permohonan 3. Menetapkan Hakim yang memeriksa 4. Mencatat pada register penunjukan Hakim 5. Menerima berkas perkara TIPIRING dari Kepaniteraan Pidana 6. Meneliti berkas perkara TIPIRING 7. Menetapkan Hakim yang memeriksa 8. Mencatat pada register penunjukan Hakim 9. Menerima berkas perkara Lalulintas dari Kepaniteraan Pidana 10. Menetapkan Hakim yang memeriksa 11. Mencatat pada register penunjukan Hakim 12. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dari Majelis Hakim 14. Membaca dan meneliti permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan 15. Menandatangani surat perpanjangan penahanan yang diajukan 	
3	Hakim	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Hakim Pengawas Bidang 2. S.O.P Pelayanan Persidangan Perdata 3. S.O.P Pelayanan Persidangan Pidana 	
4	Panitera	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Penunjukan Panitera Pengganti 2. S.O.P Pelaksanaan Eksekusi Riil 3. S.O.P Pelaksanaan Eksekusi Lelang / Pembayaran Sejumlah Uang 4. S.O.P Penunjukan Panitera Pengganti untuk perkara tipiring dan lalulintas 5. S.O.P Legalisasi Bukti Surat 	
5	Panitera Muda Pidana		<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Proses Penerimaan Perkara Pidana Biasa (Dewasa) 	

		15	<ol style="list-style-type: none"> 2. S.O.P Proses Penerimaan Pidana Anak 3. S.O.P Proses Penerimaan Perkara Pidana Singkat 4. S.o.p Proses Penerimaan Perkara Pidana Cepat (Tipiring) 5. S.O.P Proses Penerimaan Perkara Pidana Cepat Lalu Lintas 6. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Banding 7. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Kasasi 8. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Praperadilan 9. S.O.P Proses Penerimaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 10. S.O.P Proses Penerimaan Grasi 11. S.O.P Proses Penerimaan Permohonan Ijin / Persetujuan Penyitaan 12. S.O.P Proses Penerimaan Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeledahan 13. S.O.P Proses Penerimaan Permohonan Diversi 14. S.O.P Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2), (3) Kuhp Tahap Satu Dan Dua 15. S.O.P Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25b Ayat (2) Kuhp 	
6	Panitera Muda Perdata	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Perkara Perdata Permohonan 2. S.O.P Perkara Perdata Gugatan / Perlawanan 3. S.O.P Proses Perkara Perdata Banding 4. S.O.P Prose Perkara Perdata Kasasi 5. S.O.P Proses Perkara Pk 6. S.O.P Eksekusi Rill 7. S.O.P Eksekusi Lelang 8. S.O.P Pengembalian Sisa Panjar 	

7	Panitera Muda Hukum	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Laporan Perkara 2. S.O.P Pengesahan Badan Hukum 3. S.O.P Pendaftaran Surat Kuasa 4. S.O.P Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil 5. S.O.P Kerjasama Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 6. S.O.P Penanganan Pengaduan 7. S.O.P Pelayanan Informasi 8. S.O.P Layanan Penelitian Informasi Data 9. S.O.P Pengarsipan Berkas Perkara 10. S.O.P Metodologi Analisa Terhadap Survey Kepuasan Pengguna Keadilan 	
8	Panitera Pengganti	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana 2. S.O.P Panitera Pengganti Dalam Perkara Perdata 	
9	Jurusita / JSP	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P Panggilan Sidang 2. S.O.P Pemberitahuan dan Pernyataan Banding / Kasasi/Pk Dan Pemberitahuan Inzage 3. S.O.P Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/Pk Dan Kontra Memori Banding/Kasasi/Pk 4. S.O.P Sita 5. S.O.P Pelaksanaan Eksekusi 6. S.O.P Konsignatie 7. S.O.P Delegasi Masuk 8. S.O.P Delegasi Keluar 	
II	NON TEKNIS			
1	Sekretaris		<ol style="list-style-type: none"> 1. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 2. S.O.P Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Kepegawaiandan Ortala 3. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Keuangan 4. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan Sub Bagian 	

			Perencanaan, IT dan Pelaporan 5. S.O.P Persetujuan Protokoler 6. S.O.P Persetujuan Pemantauan	
2	Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	9	1. S.O.P Perencanaan Daftar Isiiian pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2. S.O.P Pengajuan Revisi POK (DIPA) 3. S.O.P Perawatan SIPP 4. S.O.P Pengelolaan Website 5. S.O.P Perawatan dan mengatasi masalah jaringan 6. S.O.P Peliputan dan Penginputan Website 7. S.O.P Penghimpunan Laporan 8. S.O.P Laporan Tahunan 9. S.O.P Pengumpulan data LKjIP	
3	Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	15	10. S.O.P Bezetting 11. S.O.P Daftar urut kepangkatan (duk) 12. S.O.P Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai 13. S.O.P Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 14. S.O.P Pengusulan Kenaikan Pangkat 15. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (Kgb) 16. S.O.P Usulan Promosi Jabatan 17. S.O.P Pensiun Hakim Dan Pegawai 18. S.O.P Penyelesaian Surat Cuti Hakim Dan Pegawai 19. S.O.P Sasaran Kinerja Pegawai (Skp) 20. S.O.P Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu 21. S.O.P Update Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi Sikep S.O.P Pembuatan Surat Tugas. 22. S.O.P Hukuman Disiplin 23. S.O.P Usulan Mutasi Hakim Dan Pegawai 24. S.O.P Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	
4	Sub Bagian Umum dan Keuangan		1. S.O.P Pengelolaan surat masuk 2. S.O.P Pengelolaan surat	

		27	keluar 3. S.O.P Resepsionis 4. S.O.P Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (Atk) 5. S.O.P Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian) 6. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Simak Bmn (Kegiatan Harian) 7. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun (Kegiatan Harian) 8. S.O.P Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn Semester Dan Tahunan 9. S.O.P Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana 10. S.O.P Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (Atk) 11. S.O.P Pengelolaan Perpustakaan 12. S.O.P Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 13. S.O.P Penyusunan Uraian Tugas Pengamanan Dan Petugas Kebersihan 14. S.O.P Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) 15. S.O.P Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan) 16. S.O.P Penanganan Surat Masuk 17. S.O.P Penanganan Surat Keluar 18. S.O.P Pengelolaan Administrasi Keuangan Pembuatan Kartu Identitas Pengantar Surat Perintah Membaray (Spm)/ Pengambilan Surat Perintah Pencarian Dana (Sp2p) 19. S.o.p Pengelolaan Administrasi Keuangan Pembuatan Rencana Penarikan Dana 20. S.O.P Pengajuan Uang Persediaan 21. S.O.P Penerbitan Spp-Ls Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk) 22. S.O.P Penerbitan Spp-Ls Untuk Belanja Pegawai	
--	--	----	--	--

			(Pembayaran Uang Lembur) 23. S.O.P Penerbitan Spp-Ls Untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan) 24. S.O.P Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi) 25. S.O.P Pembuatan Laporan Keuangan 26. S.O.P Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran 27. S.O.P Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak	
--	--	--	---	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, maka Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II dengan merujuk pada beberapa aturan, baik petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II, serta terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing personal yang ada di lembaga Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah menyusun beberapa Standar Operating Prosedur yang berlaku dan diberlakukan secara efektif di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II dan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II, diantaranya sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan ini, namun demikian secara singkat pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur (SOP)

- SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

No. Urut	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1.	Ketua	7	1. Menerima dan Mendisposisi surat – surat masuk; 2. Menandatangani Surat Keluar; 3. Menetapkan Majelis Hakim Perkara Baru;

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian; 5. Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 6. Menugaskan Hakim Pengawas Bidang; 7. Melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Perkara.
2.	Wakil Ketua	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Mendisposisi Surat Masuk; 2. Melakukan Pembinaan Administrasi Teknis dan Non Teknis; 3. Melakukan Pengawasan Internal (Umum); 4. Melakukan Koordinasi Pengawas Bidang; 5. Menandatangani Penetapan – Penetapan Izin Sita; 6. Menandatangani Penetapan – Penetapan; 7. Izin Penggeledahan; 8. Menerima,Memeriksa Berkas Perkara Perdata; 9. Memutus Perkara Perdata; 10. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana; 11. Memutus Perkara Pidana; 12. Melakukan Rapat Baperjakat; 13. Melakukan Evaluasi dan Melaporkan hasil Pengawasan Membuat Laporan Kegiatan Hakim.
3.	Hakim	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, Mempelajari dan Menyidangkan Perkara Pidana Biasa / Singkat; 2. Musyawarah dan Membuat Putusan Perkara Pidana Biasa / Singkat; 3. Menerima, Menyidangkan dan Memutuskan Perkara Tipiring / Lalu Lintas; 4. Menerima dan Mempelajari Berkas Perkara Perdata Gugatan; 5. Musyawarah dan Membuat Putusan Perkara Perdata Gugatan; 6. Menerima, Mempelajari, memutuskan Perkara Perdata Permohonan; 7. Membuat Laporan Kegiatan Hakim; 8. Mengikuti Pertemuan rapat-rapat dan diskusi pada PN-Sidikalang; 9. Melaksanakan Tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Melaporkan Hasil Pengawasan.
4.	Panitera	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Mendisposisi Surat; 2. Menjawab dan Mengirim Surat; 3. Meneliti dan Menandatangani Laporan Bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulanan dan Tahunan; 4. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim (Pidana dan Perdata); 5. Menandatangani Salinan Putusan dan Penetapan; 6. Menandatangani Akte Banding,Kasasi, PK dan Grasi;

			<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengirimkan Berkas Banding, Kasasi dan PK; 8. Menetapkan tugas kepada Wapan dan Panitera Muda; 9. Melaksanakan pengelola Keuangan Perkara dan Uang Pihak ketiga; 10. Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 11. Mendampingi Majelis Hakim bersidang; 12. Pemberian tugas kepada Jurusita dan Jurusita Pengganti untuk panggilan sidang dan Aanmaning; 13. Pemberian tugas kepada Jurusita dan Jurusita Pengganti untuk melaksanakan penyitaan dan Eksekusi; 14. Menandatangani Pendaftaran Surat Kuasa; 15. Menandatangani Pendaftaran CV dan UD.
5.	Panitera Muda Pidana	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan Kebutuhan Tahunan; 2. Membuat Berita Acara Sidang dan Minutasi perkara baik Elektronik maupun Manual; 3. Menginput data perkara ke SIPP; 4. Membuat Laporan Perkara; 5. Melaksanakan Manajemen Persuratan dan Pengarsipan; 6. Menerima Berkas Perkara; 7. Membuat Penetapan Hari Sidang; 8. Membuat Penahanan 30 hari dan perpanjangan Penahanan 60 Hari; 9. Membuat Petikan Putusan.
6.	Panitera Muda Perdata	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Gugatan / Permohonan dan Upaya Hukum Perdata serta menaksir Panjar Perkara 2. Menyusun Rencana Kerja dan kebutuhan Tahunan; 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Perkara dan biaya proses dari Pengadilan Lain; 4. Memberikan Bimbingan dan Pembinaan kepada staf bawahan; 5. Membuat Berita Acara sidang dan Minutasi perkara baik elektronik maupun manual; 6. Mengupload Putusan ke Direktori Putusan setiap perkara; 7. Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual; 8. Melaksanakan Manajemen Persuratan / disposisi; 9. Menerima Berkas Perkara; 10. Membuat Penetapan Hari Sidang; 11. Membuat Penahanan 30 Hari dan Perpanjangan Penahanan 60 Hari; 12. Membuat Petikan Putusan.

7.	Panitera Muda Hukum	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan Tahunan; 2. Membuat Berita Acara Sidang dan Minutasi perkara baik Elektronik maupun Manual; 3. Menginput data Perkara ke SIPP; 4. Membuat Laporan Perkara; 5. Mengelola dan Menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual; 6. Melaksanakan Manajemen Persuratan dan Pengarsipan; 7. Membuat Penetapan Hari Sidang; 8. Membuat Penahanan 30 Hari dan Perpanjangan 60 Hari; 9. Membuat Petikan Putusan; 10. Melaksanakan Pendaftaran Badan Hukum dan Surat Kuasa.
8.	Panitera Pengganti	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima berkas Perkara Pidana dan Perdata; 2. Membuat Penetapan Hari Sidang; 3. Membuat Berita Acara Sidang; 4. Membuat Penahanan 30 Hari dan Perpanjangan 60 Hari; 5. Minutasi Perkara; 6. Memasukkan data Perkara ke SIPP; 7. Membuat Petikan Putusan.
9.	Jurusita	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panggilan Sidang; 2. Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II; 3. Pemberitahuan Banding; 4. Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding; 5. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding; 6. Pemberitahuan Putusan Banding; 7. Pemberitahuan Penyerahan Kasasi; 8. Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi; 9. Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Kasasi.
10.	Sekretaris	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola Surat Masuk; 2. Mengelola Surat Keluar; 3. Mengelola Aplikasi SAKTI-ASET TETAP; 4. Mengelola Aplikasi persediaan SAKTI; 5. Rekonsiliasi Internal dengan Pengelola Aplikasi SAKTI; 6. Rekonsiliasi dengan KPKNL Sidikalang; 7. Membuat CALK BMN; 8. Membuat Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan; 9. Pengelolaan Penatausahaan BMN dan ATK / Barang Persediaan; 10. Pengadaan Barang dan Jasa.

11.	Kassubang Kepegawaian dan Ortala	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, meneliti serta mengagendakan sampai mengarsipkan surat – surat masuk yang didisposisi oleh Ketua, Panitera serta Sekretaris; 2. Membuat Konsep surat / Membuat surat; 3. Membuat SPMT, SPMJ Hakim / Pegawai; 4. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat; 5. Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala; 6. Mempersiapkan dan Melaksanakan Kegiatan Pelantikan Pejabat; 7. Membuat Cuti Hakim dan Pegawai; 8. Membuat Usul Jabatan / Mutasi Hakim /Pegawai; 9. Merekap Absensi Manual dan Finger Print; 10. Membuat Surat Tugas , Surat Izin Keluar Kantor; 11. Menyiapkan Pelaksanaan Upacara Hari Nasional; 12. Membuat Laporan.
12.	Kassubag Perencanaan TI dan Pelaporan	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan Tahunan; 2. Menyusun RKA-KL; 3. Menyusun TOR & RAB; 4. Membuat Saku; 5. Menyusun Rencana Umum Pengadaan; 6. Membuat Laporan Triwulan Ke Aplikasi Bapenas PP-39; 7. Monitoring Akses Internet Kantor; 8. Monitoring Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara; 9. Mengelola Website; 10. Tugas – tugas lain sebagai Bendahara Pengeluaran; 11. Membina Staf / Bawahan.
13.	Kassubag Umum dan Keuangan	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan; 2. Melaksanakan tugas-tugas bagian umum; 3. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat; 4. Mengelola dan menyusun laporan barang milik Negara; 5. Menyusun program kerja 1 (satu) tahun; 6. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas keuangan; 7. Menyusun anggaran (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal); 8. Melaksanakan anggaran yang terdapat dalam DIPA (gaji induk, gaji susulan).
14.	Bendahara	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayarkan Tagihan Pos, Telepon, Internet dan Penyetoran Pajak serta melaporkan ke Kantor Pajak; 2. Membuat DRPP DIPA 01 dan DIPA 03 serta

			<p>Kwitansi dan Kelengkapannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengirimkan keperluan yang di butuhkan KPPN yang bersangkutan dengan Keuangan; 4. Mengarsipkan SPM yang sudah menjadi SP2D, melengkapi Kwitansi serta menandatangani kepada KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran; 5. Membuat SPPD dan Kwitansi; 6. Membuat Lampiran Rekening Gaji Pegawai dan Rekap; 7. Membantu Kassubag Umum dan Keuangan setiap di Perlukan; 8. Menginput data ke Aplikasi SAKTI dan Rekonsiliasi dengan KPPN; 9. Membuat Gaji, Uang Makan dari Aplikasi Gaji Web setiap Bulannya; 10. Pengajuan Tunjangan Kinerja Pegawai dan Uang Transport Hakim.
--	--	--	---

BAB II
KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

A. LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2025

NO	BULAN	PIDANA BIASA				PIDANA BIASA ANAK				PIDANA CEPAT				PIDANA LALU LINTAS				PIDANA PRAPERADILAN			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Januari	32	6	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	20	11	13	18	0	2	1	1	0	0	0	0	0	218	218	0	0	0	0	0
3	Maret	18	10	10	18	1	1	2	0	0	0	0	0	0	156	156	0	0	0	0	0
4	April	18	14	7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	0
5	Mei	25	13	12	26	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	26	19	5	40	0	1	0	1	0	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0	0
7	Juli	40	17	44	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	91	20	71	0	0	0	0
8	Agustus	13	11	2	22	0	1	1	0	0	0	0	0	71	75	0	146	0	0	0	0
9	September	22	13	16	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0
10	Oktober	19	8	11	16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
11	November	16	16	10	22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	Desember	22	17	13	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Ket : A : Sisa Bulan Lalu, B: Masuk Bulan Ini , C: Putus Bulan Ini, D : Sisa Bulan Ini

LAPORAN KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II

NO	BULAN	GUGATAN					GUGATAN SEDERHANA					PERMOHONAN				
		SISA AWAL	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	23	7	9	0	21	0	0	0	0	0	0	5	4	0	1
2	Februari	21	11	7	1	25	0	5	4	0	1	1	3	2	0	2
3	Maret	25	11	7	0	29	1	4	0	0	5	2	1	2	0	1
4	April	29	6	6	0	29	5	0	5	0	0	1	2	3	0	0
5	Mei	29	10	7	1	32	0	0	0	0	0	0	5	4	0	1
6	Juni	32	10	6	0	36	0	0	0	0	0	1	4	2	0	3
7	Juli	36	10	16	0	30	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0
8	Agustus	30	9	7	0	32	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1
9	September	32	10	11	0	31	0	0	0	0	0	1	8	5	0	4
10	Oktober	31	10	9	0	32	0	1	0	0	1	4	2	6	0	0
11	November	32	9	10	0	31	1	1	2	0	0	0	7	5	0	2
12	Desember	31	6	12	0	25	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

**LAPORAN KEADAAN
PERKARA BANDING PIDANA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II**

No	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MASUK THN 2025	JLH	PUTUS	DIKIRIM	SISA THN 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BANDING	1	49	50	46	47	1	

**LAPORAN KEADAAN
PERKARA BANDING PERDATA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II**

No	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MASUK THN 2025	JLH	PUTUS	DIKIRIM	SISA THN 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	BANDING	2	14	16	14	14	22	

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

**LAPORAN KEADAAN
PERKARA KASASI PIDANA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II**

No	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MASUK THN 2025	JLH	PUTUS	DIKIRM	SISA THN 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	KASASI	0	27	27	18	24	17	

**LAPORAN KEADAAN
PERKARA KASASI PERDATA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II**

No	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MASUK THN 2025	JLH	DIKIRM	SISA THN 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	-
1	KASASI	0	11	11	11	0	

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

**LAPORAN KEADAAN
PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II**

No	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MASUK THN 2025	JLH	PUTUS	DIKIRM	SISA THN 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PENINJAUAN KEMBALI	0	10	10	10	10	0	

**LAPORAN KEADAAN
PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG KELAS II**

No	UPAYA HUKUM	SISA THN 2024	MASUK THN 2025	JLH	DIKIRM	SISA THN 2025	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-	-	-	-	-
1	PENINJAUAN KEMBALI	1	4	5	5	0	

B. Penyelesaian Perkara

a) Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus :

A. Penyelesaian Perkara

- **Jumlah Sisa Perkara Yang Putus**

Pidana Biasa	: 32 Perkara
Pidana Anak	: 0 Perkara
Perdata Gugatan	: 23 Perkara
Perdata Permohonan	: 0 Perkara

- **Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Perkara Pidana

Pidana Biasa Januari s/d Desember 2025	: 155 Perkara
Pidana anak Januari s/d Desember 2025	: 8 Perkara

Perkara Perdata

Gugatan Januari s/d Desember 2025	: 98 Perkara
Permohonan Januari s/d Desember 2025	: 41 Perkara
Gugatan Sederhana	: 11 Perkara

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Perkara Pidana

Banding Januari s/d Desember 2025	: 116 Perkara
Kasasi Januari s/d Desember 2025	: 138 Perkara
PK Januari s/d Desember 2025	: 154 Perkara

Perkara Perdata

Banding Januari s/d Desember 2025	: 101 Perkara
Kasasi Januari s/d Desember 2025	: 106 perkara
PK Januari s/d Desember 2025	: 109 perkara

- **Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif**

Januari s/d Desember 2025 : 6 Perkara

- **Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Dimediasi**

Januari s/d Desember 2025 : 12 Perkara

- **Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi**

Januari s/d Desember 2024 : 0 berkas

- **Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan E-Court**

- Pendaftaran Gugatan dengan ecourt : 109 Perkara
- Pendaftaran Gugatan Sederhana dengan e-court : 11 Perkara
- Pendaftaran Permohonan dengan e-court : 41 Perkara
- Persidangan dengan Etiligasi :
 1. Gugatan : 109 Perkara
 2. Gugatan Sederhana : 11 Perkara
 3. Permohonan : 41 Perkara

- **Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)**
Januari s/d Desember 2025 : 155 Perkara
- **Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)**
Januari s/d Desember 2025 : 630 Permohonan

No	Fitur Pelayanan	Jumlah Permohonan
1	E-Pelimpahan	155
2	E-Penggeledahan	66
3	E-Penyitaan	193
4	E-Penahanan	206
5	E-Pembantaran	5
6	E-Diversi	0
7	E-Izin Pinjam Pakai	5
8	E-Izin Besuk	0
9	E-Pra Peradilan	0
10	E-Pengalihan Tahanan	0
11	E-Penahanan Tk. Banding	5
12	Laporan Banding	0
13	E-Penangguhan Penahanan	0
14	E-Izin Keluar Tahanan	0
15	E-Pindah Tempat Sidang	0

C. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional Pengadilan Negeri Sidikalang adalah dengan melakukan Penegakan Hukum dan Perbaikan Sistem Hukum baik Pidana maupun Perdata. Pelayanan pengadilan baik yang bersifat administrasi perkara maupun pelayanan pengadilan dituntut untuk melakukan terobosan dan perbaikan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat semakin dipermudah untuk memenuhi kebutuhan terkait kepentingan hukum di pengadilan, tidak dipersulit dan cepat untuk menuntaskan permasalahan personalnya tanpa masalah lain. selain itu dengan diharapkan terobosan dapat mempermudah kinerja-kinerja peradilan yang saat ini sangat masih terhalang dengan waktu, kesempatan maupun ruangan sidang yang terbatas. Berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan adanya PERMA

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin kenyamanan pihak yang akan melakukan aktifitasnya. Dari PERMA tersebut dikembangkanlah aplikasi berbasis online yaitu e-Court (Elektronik court/ sistem administrasi pengadilan dan perkara dalam bentuk digital) yang dapat diakses melalui laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. E-court adalah pelayanan kepada pengguna aplikasi yang telah teregister dan memiliki akun/identitas terdaftar sehingga untuk Pendaftaran Perkara dapat dilakukan secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam e-court ini dikenal istilah domisili elektronik berupa akun email ataupun nomor telepon yang telah diverifikasi. selain itu dalam pelaksanaan sidang secara elektronik (jawab-jinawab, kesimpulan) dapat dilaksanakan tanpa harus datang ke gedung pengadilan.

Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran) Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II di Tahun 2025 memiliki Pos Bantuan Hukum dengan Perjanjian Kerjasama (Nomor: 79/KPN.W2-U14/HK1.3.1/I/2025 Tanggal: 09 Januari 2025) dengan Advokat/ Pengacara/ Paralegal dari LBH DIKAIOSYNI LAW FIRM yang berkedudukan di Sidikalang. Pada DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II menerima Anggaran untuk Kegiatan Pos Bantuan Hukum ini senilai Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang digunakan untuk membayar Honor Advokat/ Pengacara/ Paralegal yang Piket dalam memberikan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat. Setiap orang 1 Advokat/Pengacara Piket mendapatkan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per jam.

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II Tahun 2025 tidak mempunyai kegiatan untuk sidang keliling/pelayanan terpadu.

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II di Tahun 2025 Pada DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum, tidak menerima Anggaran untuk Penyelesaian Pembebasan Perkara bagi Masyarakat yang tidak mampu.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia

Keadaan jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II dengan Ketua, Hakim dan Pegawai yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah 43 (empat puluh tiga) orang termasuk dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perincian :

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan
1.	Eva Rina Sihombing, S.H., M.H	Ketua	Pembina Tk.I/ (IV/b)
2.	Mhd. Iqbal Fahri Junaedy, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Pembina/ (IV/a)
3.	Nancy M. Rezeki Saragih, S.H.	Hakim	Penata Muda /(III/a)
4.	David Julianus Saruksuk, S.H.	Hakim	Penata Muda / (III/a)
5.	Reni Ringgita Pratama Putri Laia, S.H.	Hakim	Penata Muda / (III/a)
6.	Jatmiko Wirawan, S.H.	Hakim	Penata Muda /(III/a)
7.	Agung Christofan Dedas Sinuhaji, S.H.	Hakim	Penata Muda / (III/a)
8.	Eflin Minar Modesta Gultom, S.H.		Penata Muda / (III/a)
9.	Guntur Aris Prabowo, S.H.		Penata Muda / (III/a)
10.	Jafan Fifaldi Harahap, S.H		Penata Muda / (III/a)
11.	Clarita Stefanie Panjaitan, S.H		Penata Muda / (III/a)
12.	Nelson Roberth Saragih, S.H.	Panitera	Pembina /(IV/a)
13.	Danny Irawan Manurung, S.Kom.	Sekretaris	Penata Tk. I /(III/d)
14.	Melian Monanita, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata /(III/a)
15.	Eljon Gultom	Panitera Muda Pidana	Penata /(III/c)
16.	Veronica A.Y.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Penata /(III/c)
17.	Franslondo Ompusunggu, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penata Muda Tk.I /(III/b)
18.	Redia Sianturi, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I / (III/b)
19.	Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I / (III/b)
20.	Hariyanto Valentino Tambunan, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Tk. I (III/d)
21.	Dariaman Saragih	Jurusita	Penata Muda Tk.I / (III/b)
22.	Hermanto Pandiangan	Jurusita	Pengatur Tk.I / (II/d)
23.	Lina Suryani Nasution, S.H.	Analisis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Pidana	Penata Muda / (III/a)

24.	Dewi Sunarti Girsang, S.E.	Arsiparis Pelaksana/Bendahara Pengeluaran	Penata Muda / (II/a)
25.	Atika Cindy Simanjuntak, S.E.	Arsiparis Pelaksana	Penata Muda / (III/a)
26.	Lasinda Simbolon, A.Md	Arsiparis Pelaksana	Pengatur Tk.I / (II/d)
27.	Jonson Evrinando Panjaitan, A.Md	Teknisi Sarana dan Prasarana	Pengatur Tk.I / (II/d)
28.	Ronal Jekson Marpaung, A.Md	Pengelola Perkara (Staf Kepaniteraan Perdata (Kasir Perdata)	Pengatur / (II/c)
29.	Yuheni Tarida Kendal Simangunsong, S.H.	Analisi Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
30.	Tessa Novita Hotmauli Pakpahan, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Penata Muda (III/a)
31.	Eriksyah P. Pakpahan, A.Md	Dokumentalis Hukum-CPNS	Pengatur / (II/c)
32.	Sulastri Ida Suriani Nababan, A.Md	Dokumentalis Hukum-CPNS	Pengatur / (II/c)
33.	Hotma Roganda Silaen, A.Md	Dokumentalis Hukum-CPNS	Pengatur / (II/c)
34.	Larista Uli Siregar, A.Md	Dokumentalis Hukum-CPNS	Pengatur / (II/c)
35.	Oloan Bako, S.H.	Penata Layanan Operasional	IX
36.	Victor hamonangan Simanjuntak	Penata Layanan Operasional	IX
37.	Heri Juliano Tambunan, S.H.	Penata Layanan Operasional	IX
38.	Ramboyon Sihotang, S.H.	Penata Layanan Operasional	IX
39.	Anita Theresia Nababan, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	VII
40.	Monika Desi Deria Nainggolan	Operator Layanan Operasional	V
41.	Darwin Ropindo Marudut Silalahi	Operator Layanan Operasional	V
42.	Daniel	Operator Layanan Operasional	V
43.	Toga Junaedy P.S.	Operator Layanan Operasional	V

1. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Dalam pembinaan sumber daya manusia non teknis yudisial adalah seperti :

- a. Pejabat Struktural disamping pembinaan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun diklat, agar nantinya lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas

sehari-hari pada masing-masing bidang.

- b. Para karyawan/i, disamping pembinaan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun Seminar sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk Pengelolaan, Ketua Pengadilan memberikan wewenang kepada Panitera dan Sekretaris, Panitera dan Sekretaris juga memberikan wewenang kepada Para Panitera Muda dan Para Kasubag yang mengelola bagian masing-masing.

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II tahun 2025 masih kekurangan formasi pegawai, baik bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan.

No.	Bagian	Jumlah Staf
1.	Kepaniteraan Pidana	1 Panitera Muda 3 Staf
2	Kepaniteraan Perdata	1 Plt. Panitera Muda 3 Staf
3	Kepaniteraan Hukum	1 Panitera Muda 3 Staf
4	Bagian Umum dan Keuangan	1 Kasubbag 6 Staf
5	Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Kasubbag 1 Staf
6	Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Kasubbag 2 Staf

A. Mutasi

- a. Pada tahun 2025 Hakim maupun Pegawai yang mutasi (**masuk**) ke Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II antara lain:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN/ ASAL SATKER
1	Nancy M. Rezeki Saragih, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
2	David Julianus Saruksuk, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Situbondo
3	Reni Ringgita Pratama Putri Laia, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Subang

4.	Jatmiko Wirawan, S.H.	Hakim PengadilanNegeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Cilacap
5.	Agung Christofan Dedas Sinuhaji, S.H.	Hakim PengadilanNegeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
6.	Eflin Minar Modesta Gultom, S.H.	Hakim PengadilanNegeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Subang
7.	Guntur Aris Prabowo, S.H.	Hakim PengadilanNegeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo
8.	Jafan Fifaldi Harahap, S.H	Hakim PengadilanNegeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi
9.	Clarita Stefanie Panjaitan, S.H	Hakim PengadilanNegeri Sidikalang	Calon Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri
10.	Tessa Novita Hotmauli Pakpahan, S.T.	CPNS PengadilanNegeri Sidikalang	CPNS
11.	Eriksyah P. Pakpahan, A,Md	CPNS PengadilanNegeri Sidikalang	CPNS
12.	Sulastri Ida Suriani Nababan, A.Md	CPNS PengadilanNegeri Sidikalang	CPNS
13.	Hotma Roganda Silaen, A.Md	CPNS PengadilanNegeri Sidikalang	CPNS
14.	Larista Uli Siregar, A.Md	CPNS PengadilanNegeri Sidikalang	CPNS

- b. Pada tahun 2025 Hakim maupun pegawai yang mutasi (**keluar**) dari Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II antara lain:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN/ SATKER TUJUAN
1	Rumia R.A.C Lumban Raja, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun
2	Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat
3	Dimas Ari Wicaksono, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat
4.	Johannes Edison Haholongan, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar
5.	Guntur Frans Gerri, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang	Hakim Pengadilan Singaraja
6.	Anita Seroja Sembiring, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sidikalang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan
7	Melva Mega Nanda, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat

B. Promosi

Pada tahun 2025 Hakim maupun pegawai yang mendapat promosi di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II antara lain:

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
NIHIL			

C. Pensiun

Pegawai Pensiun tahun 2025:

NO	NAMA	JABATAN LAMA	KETERANGAN
NIHIL			

D. Diklat

Hakim/Pegawai yang Diklat Pada Tahun 2025:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H.	KETUA	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
2	NANCY M.REZEKI SARAGIH, S.H	HAKIM	Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan Ix Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
			Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2
			Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
3	RENI RINGGITA PRATAMA PUTRI LAIA, S.H.	HAKIM	Kegiatan Bimbingan Teknis Mediator dengan Metode Blended Learning bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
			BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) SECARA ONLINE (DARING) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

4	DAVID JULIANUS SARUKSUK, S.H.	HAKIM	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
			Kegiatan Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
			Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
5	GUNTUR ARIS PRABOWO, S.H.	HAKIM	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2
			Kegiatan Bimbingan Teknis Mediator Dengan Metode Blended Learning Bagi Hakim Angkatan IX Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
			Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2
			Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
6	JATMIKO WIRAWAN, S.H.	HAKIM	Bimbingan Teknis Mediator
			Bimbingan Teknis Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara Online (Daring) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025
7	CLARITA STEFANIE PANJAITAN, S.H.	HAKIM	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1
8	JAFAN FIFALDI HARAHAP, S.H.,M.H.	HAKIM	Bimbingan Teknis Mediator
			Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2
9	TESSA NOVITA HOTMAULI PAKPAHAN, S.T.	CPNS - TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025

10	ERIKSYAH P. PAKPAHAN, A.Md.	CPNS - DOKUMENTALIS HUKUM	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang III secara Distance Learning Tahun 2025
11	HOTMA ROGANDA SILAEN, A.Md.	CPNS - DOKUMENTALIS HUKUM	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang III secara Distance Learning Tahun 2026
12	SULASTRI IDA SURIANI NABABAN, A.Md.	CPNS - DOKUMENTALIS HUKUM	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang III secara Distance Learning Tahun 2027
13	LARISTA ULI SIREGAR, A.Md.A.B.	CPNS - DOKUMENTALIS HUKUM	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang III secara Distance Learning Tahun 2028

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN SARANA
DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II meliputi : Layanan Umum meliputi Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah, Layanan Perkantoran Meliputi Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang meliputi Layanan Sarana Internal dengan rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Layanan Sarana Internal

NO	BELANJA PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMTABEL			
	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	700,000	700,000	100	0

Gaji dan Tunjangan

NO	BELANJA PEGAWAI			
	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	4,296,415,000	4,220,866,737	98,24	75,548,263

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Belanja Rp	Realisasi Belanja Rp
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1,391,326,000	1,390,324,900
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	89,315,000	89,314,960
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	88,046,000	88,045,460

2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,000	19,872
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	1,308
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	1,264
3	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	75,000,000	74,938,442
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	6,060,000	6,059,480
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	6,013,000	5,960,680
4	Belanja Tunjangan Anak PNS	16,650,000	16,631,530
	Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)	1,329,000	1,328,032
	Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 14)	1,303,000	1,302,576
5	Belanja Tunjangan Struktural PNS	24,120,000	24,120,000
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	2,010,000
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	2,010,000
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40,120,000	40,090,000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	3,770,000	3,770,000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	3,770,000	3,770,000
7	Belanja Tunjangan PPh PNS	1,000	0
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	2,306,000	2,305,680
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	2,300,000	2,293,431
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	70,000,000	69,668,040
9	Belanja Uang Makan PNS	284,254,000	241,305,000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,280,000	15,280,000
11	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	730,000	730,000
12	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	730,000	730,000
13	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	175,881,000	156,723,959

14	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 13)	31,601,000	31,600,416
15	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara (gaji ke 14)	31,600,000	31,558,051
16	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,736,621,000	1,729,870,000
17	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 13)	110,400,000	110,400,000
18	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke 14)	110,400,000	110,400,000
19	Belanja Gaji Pokok PPPK	103,000,000	102,876,800
20	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,000	1,108
21	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,200,000	7,134,960
22	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,000,000	1,939,568
23	Belanja Beras PPPK	7,000,000	6,662,640
24	Belanja Uang Makan PPPK	25,000,000	20,489,000
25	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,600,000	6,560,000
	Total	4,296,415,000	4,220,866,737

Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor

NO	BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIRAN KANTOR			
	PAGU DIPA	REALISASI/ PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	1,137,387,000	1,136,597,381	99.93	789,619

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pelaksanaan program peningkatan manajemen manajemen peradilan umum di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II meliputi: Percepatan Penyelesaian Perkara, Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum, dengan rincian pagu dan realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM			
	PAGU DIPA	REALISASI/ PELAKSANAAN		SISA SD SAAT INI
	Rp	Rp	%	Rp
1	125,034,000	125,006,090	99.98	27,910

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Manajemen Asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II mengelola asset/barang milik Negara meliputi:

1. Tanah

Beberapa asset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II Tahun 2025 dapat dilihat di bawah ini.

Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II

No	Tanah	Luas Tanah
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gd. I	2.742 m2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.45 m2

2. Gedung dan Bangunan

Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II per 31 Desember 2025 yaitu :

Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II

No	Gedung Bangunan	Satuan (Unit)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6
2	Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe B	1
3	Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe C	12

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II

per 31 Desember 2025 yaitu :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Inova	2009	Baik	-	-	BB 5 Y
2.	Mitsubshi Kuda	2004	Baik	-	-	BB 266 Y
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra 125	2006	Baik		-	BB 2149 Y
2.	Honda Supra 125	2006	Baik	-	-	BB 2148 Y
3.	Honda Supra 125	2007	Baik	-	-	BB 2308 Y
4.	Honda Supra 125	2008	Baik	-	-	BB 2332 Y
5.	Honda Mega Pro	2008	Baik	-	-	BB 2331 Y

4. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik			
3.	Rumah Dinas Hakim	6	Baik			

4	Rumah Dinas Panitera	1			Rusak Berat	
5	Rumah Dinas Pegawai	4	Baik			

Matrik Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Sidikalang

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1 Buah	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1 Buah	Baik
3	Ruang Hakim	2 Buah	Baik
4	Ruang Panitera	1 Buah	Baik
5	Ruang Sekretaris	1 Buah	Baik
6	Ruang Sidang	3 Buah	Baik
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1 Buah	Baik
8	Ruang Panitera Muda Perdata	1 Buah	Baik
9	Ruang Panitera Muda Hukum	1 Buah	Baik
10	Ruang Umum dan Keuangan	1 Buah	Baik
11	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Buah	Baik
12	Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan	1 Buah	Baik
13	Ruang Perpustakaan	1 Buah	Baik
14	Ruang Mediasi	1 Buah	Baik
15	Ruang Tunggu Korban Anak/Ibu Menyusui	1 Buah	Baik
16	Ruang Arsip	1 Buah	Baik
17	Ruang Tunggu Terbuka	2 Buah	Baik
18	Ruang/Kantin	1 Buah	Sederhana
19	Ruang/Musholah	1 Buah	Baik
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer/pc	22 Buah	22 buah Baik
2	Laptop	20 Buah	20 buah Baik
3	Infokus.	1 Buah	Baik

4	PABX.	-	-
5	Mesin Ketik	-	-
6	Mesin Fotocopy	1 Buah	1 Buah Baik
7	AC	1 Buah	1 Buah Baik
8	Faximile	1 Buah	Baik
9	Genset	2 Unit	Baik
10	Sound System	1 Buah	Baik
11	Lemari Besi/Metal	10 Buah	Baik
12	Lemari Kayu	16 Buah	Baik
13	Filling Cabinet Besi	9 Buah	Baik
14	Brankas	1 Buah	Baik
15	Meja Kerja Kayu	38 Buah	20 Buah Baik
16	Kursi Besi/Metal	254 Buah	Baik
17	Kursi Kayu	24 Buah	Baik
18	Bangku Panjang Kayu	22 Buah	Baik
19	Meja Komputer	3 Buah	Baik
20	Bangku Panjang besi	8 Buah	Baik
21	Sofa/Sice	7 Buah	Baik
22	Uninterruptible Power Supply (ups)	7 Buah	Baik
23	Finger Printer Time and Attandance Acces Control system	1 Buah	Baik
24	Printer	16 Buah	Baik
25	Scanner	7 Buah	Baik
26	Server	3 Buah	3 Baik
27	Router	1 Buah	Baik
28	Meja Rapat	6 Buah	6 Baik

1. Penatausahaan Barang Milik Negara

a. Pembukuan, Pencatatan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Selama periode tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II secara kontiniu melaksanakan pembukuan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

b. Penghapusan Asset /Barang Milik Negara (BMN)

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang melaksanakan penghapusan sejumlah 1.253 unit senilai Rp. 127.273.050 dengan surat keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 98/SEK/SK.PL1.2.3/I/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 10 Januari 2025;
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5259/SEK/SK.PL1.2.3/VI/2025 Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan negara selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 10 Juni 2025;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5396/SEK/SK.PL1.2.3/VI/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan negara selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 26 Juni 2025;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 26321/SEK/SK.PL1.2.3/X/2025 Penghapusan Barang Milik Negara/ Kekayaan negara selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 6 Oktober 2025.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-court dan E-Berpadu di Lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang.

Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi *web based* (aplikasi berbasis *web server*) yang diluncurkan Mahkamah Agung RI untuk Pendaftaran Perkara Online pada Triwulan IV 2018. Aplikasi ini terintegrasi ke semua Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI. Pada tahap awal aplikasi ini hanya di peruntukkan untuk pendaftaran perkara Gugatan melalui Advokat yang telah terdaftar di sistem E-Court. Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah berhasil menerima pendaftaran perkara online melalui E-Court sejak 2018. Selanjutnya Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II akan terus mensosialisasikan tatacara kepada seluruh advokat di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II yang

belum mengetahui akan hal ini dan pada desember 2019 Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II mendapat dukungan peralatan pendukung E- Court dari Mahkamah Agung RI.

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penanganan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang

Teknologi informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelayanan publik di bidang hukum. Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada publik, namun sangat diperlukan dalam percepatan proses Administrasi dalam lingkungan Pengadilan. Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah melengkapi sistem administrasi perkara secara elektronik yang dikenal dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan adanya SIPP tersebut, akses informasi perkara dapat dengan mudah diketahui oleh para pencari keadilan dengan mengakses website sipp.pn-sidikalang.go.id. Aplikasi SIPP yang ada sekarang ini pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II, telah terkoneksi dengan aplikasi E-Court dan E-Berpadu Mahkamah Agung RI. Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka dukungan teknologi informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan terutama peranannya dalam percepatan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun publikasi jadwal sidang di Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan.

Selain perangkat lunak yang disebutkan diatas Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga sudah mempunyai website dengan nama domain www.pn-Sidikalang.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-sidikalang.go.id.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 1586/DJU/SK/PS01/9/2016 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum, yang diperkuat dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM01.1.1/I?2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Sidikalang menyelenggarakan pelayanan informasi yang menjadi satu dengan pelayanan PTSP sehingga mempermudah bagi masyarakat yang memerlukan informasi. Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang senantiasa memberikan layanan terbaik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi pungli, yaitu membatasi akses pertemuan antara pemohon dengan pihak-pihak terkait.

A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Sidikalang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dalam 4 kali dalam setahun. Survei dilaksanakan melalui aplikasi SISUPER badilum dengan link <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan selama Tahun 2025 pada Triwulan Pertama adalah: 4,00/100%, Triwulan Kedua adalah: 4,00/99,90%, Triwulan Ketiga adalah: 3,99/99,79% dan Triwulan IV adalah: 4,00/100%.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang sering disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat publik berdasarkan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur

Jendral Badan Peradilan Umum Pedoman Standar Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk:

1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II memiliki inovasi berupa aplikasi penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan petugas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang di terimanya langsung secara elektronik melalui aplikasi yang tersedia.

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga memiliki aplikasi penilaian Indeks Persepsi Korupsi secara elektronik dan Penilaian indeks kepuasan masyarakat yang berdasarkan Permenpan RB sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam memberikan penilaian dan juga memudahkan bagi pimpinan pada Pengadilan

Negeri Sidikalang Kelas II dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas. Selain itu Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga memiliki Aplikasi Audio Antigratifikasi.

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan untuk Pengawasan Internal yang merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II menerima 3x jadwal pengawasan dan Pembinaan, yaitu dari :

1. Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Mei 2025 dan 21 Juli 2025 secara daring dan pada tanggal 24 Desember 2025 yang dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan secara luring. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II yang dibantu oleh Wakil Ketua meliputi:
 - Semua tingkah-laku Para Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera Pengganti dan Pegawai yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.
 - Dalam hal pengawasan tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga menunjuk Hakim Pengawas masing-masing bidang, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim Pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.

Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan brifing 1 (satu) kali 1 (satu) bulan.

- Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II juga mengevaluasi kepada Panitera Pengganti apakah semua perkara yang ditanganinya telah inkrah sudah diminutasi.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II selaku Penegak disiplin Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II selalu memantau dan melakukan pengawasan secara berkala setiap bulan terhadap disiplin kerja, absensi hakim dan pegawai, dan hal-hal yang berhubungan dengan cuti dan izin.
- Panitera juga melakukan pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh Panitera Muda, yang bertanggungjawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.
- Sekretaris melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja bagian kesekretariatan, para kasubbag dan staf di bagiannya masing-masing.

Adapun yang diperiksa dalam pengawasannya adalah :

➤ Bagian Pidana

1. Apakah dalam menerima pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum sudah benar. (berdasarkan Meja I dan Meja II) sesuai dengan Buku II.
2. Apakah dalam pengisian Buku Register Perkara Pidana Biasa sudah benar sesuai dengan Buku II.
3. Apakah dalam setiap upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi) perkara pidana sudah berjalan sesuai dengan Buku II.
4. dan lain-lain yang berhubungan dengan bagian pidana

➤ Bagian Perdata

1. Apakah penerimaan berkas perkara (gugatan dan permohonan) sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (Buku II) berdasarkan Meja I, Meja II, dan Meja III.
2. Apakah dalam menaksir dan atau menetapkan panjar biaya perkara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II /Radius)

3. Apakah upaya hukum (Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali) perkara perdata sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Buku II).
4. Apakah cara-cara dalam pengisian Buku Register (gugatan, permohonan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Eksekusi, Somasi) sudah benar sesuai dengan Buku II.
5. dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang perdata.

➤ Bagian Hukum

1. Apakah dalam pembuatan dan pengiriman laporan bulanan perkara pidana (Formulir L1. B1 dan jenis perkara pidana Model I. A) dan perdata (Formulir L1. A1 dan jenis perkara Perdata Model II. A) serta Keuangan Perkara Perdata, Kwartal Pidana (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi) dan perdata (Bandung, Kasasi serta Peninjauan Kembali), semester (Kegiatan Hakim Pidana dan Perdata) dan laporan tahunan tentang keadaan perkara baik pidana maupun perdata pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apakah ruangan arsip serta arsip sudah ditata dengan baik dan atau sudah diklasifikasikan menurut Protap.
3. dan lain - lain yang berhubungan dengan bidang hukum.

➤ Bagian Umum dan Keuangan

1. Apakah barang - barang inventaris kantor sudah didata dan diregister dengan baik, dan dilaporkan.
2. Apakah dalam penerimaan dan pengiriman surat - surat dinas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Apakah perpustakaan sudah dikelola dengan baik.
4. dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang umum

5. Apakah Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran telah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan petunjuk serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Apakah realisasi anggaran terserap dengan baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
1. Apakah urusan Kepegawaian berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan jabatan (promosi dan mutasi) setiap hakim dan seluruh pegawai.
 2. Apakah setiap laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1 (satu) kali dalam setahun, Bezetting 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sudah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Apakah seluruh file kepegawaian dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan pejabat struktural/fungsional, teknis maupun non teknis sudah disusun dan tersusun dengan baik dan rapi sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
 4. serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan urusan kepegawaian.
- Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
1. Apakah Perencanaan Anggaran DIPA satker telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
 2. Apakah seluruh perangkat Teknologi Informasi di kantor dapat berjalan dengan baik dan menunjang kinerja kantor.
 3. Apakah setiap laporan telah dibuat secara berkala dan dilaporkan tepat waktu.

B. EVALUASI

Pengelolaan Administrasi

1. Administrasi Perkara

- **Perkara Perdata Tingkat Pertama**

Prosedur penerimaan perkara sudah didasarkan sistem meja, penerimaan perkara diterima oleh Panitera Muda Perdata, menaksir biaya perkara berdasarkan penetapan Radius oleh Ketua, kemudian sudah dituangkan dalam SKUM, penaksiran biaya disesuaikan dengan ketentuan :

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka panggilan Penggugat sudah dilakukan dengan Panggilan Eletronik (E-Court), Panggilan Tergugat sudah melalui POS tercatat, Redaksi, Materai, biaya pendaftaran Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Memungut biaya panjar perkara berdasarkan SKUM yang telah ditaksir oleh meja I dan sudah ditandatangani SKUM nya. Pernomorannya perkara dalam SKUM dan dalam Gugatan sudah dilakukan oleh Kasir berdasarkan nomor urut dalam jurnal. Loket ruangan kasir sudah tersedia, biaya pencatatan dari buku jurnal ke Buku Induk Keuangan sudah sesuai dengan ketentuan, pencatatan uang Hak-hak Kepaniteraan dari Buku Induk Keuangan kedalam buku Induk Hak-hak Kepaniteraan telah dilaksanakan dengan tertib.

Tingkat Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali

Penerimaan perkara dilakukan oleh panitera muda perdata (Meja I), penerimaan biaya dan penandatanganan SKUM oleh kasir, penomorannya perkara digunakan nomor perkara awal.

- **Biaya tingkat banding :**

Pemberitahuan sebanyak 7x, biaya pendaftaran permohonan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) biaya banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ongkos kirim berkas ke pos sesuai dengan perkara, biaya fotocopy, biaya Transportasi ke POS ;

- **Biaya tingkat kasasi :**

Pemberitahuan sebanyak 6x, biaya pendaftaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya kasasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ongkos kirim berkas

ke pos sesuai dengan perkara, biaya fotocopi, biaya Transportasi ke POS;

- Biaya PK (peninjauan kembali) :

Pemberitahuan sebanyak 4x, biaya pendaftaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), biaya PK Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ongkos kirim berkas ke pos sesuai dengan perkara, biaya fotocopy, biaya Transportasi ke POS; Pencatatan biaya perkara dari buku jurnal ke buku keuangan sudah sesuai dengan ketentuan. Pencatatan hak-hak kepanitera-an dari buku induk keuangan kedalam buku hak - hak kepanitera-an sudah sesuai dengan ketentuan ;

Buku Register

Buku Register terdiri dari :

Register Induk Perkara perdata Gugatan, register Induk Perkara Perdata Permohonan, Register Permohonan Banding, Register Permohonan Kasasi, Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK), Register Surat Kuasa Khusus, Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak, Register Barang Bergerak, register Somasi (Teguran), Register Eksekusi, Register-Register lain sesuai dengan lingkungan peradilan.

Pengisian register sudah sesuai dengan setiap kolom-kolom register.

Buku Keuangan Perkara

Buku Jurnal terdiri dari :

Buku jurnal perkara tingkat pertama pada lembar pertama dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan selebihnya diparaf antara lain :

- Buku Jurnal Perkara Gugatan,
- Buku Jurnal Perkara Permohonan,
- Buku Jurnal Permohonan Somasi.

Buku jurnal permohonan banding, buku Jurnal Permohonan Kasasi, buku jurnal permohonan PK, buku Jurnal permohonan Eksekusi dan pengisiannya sesuai dengan buku petunjuk, sedangkan untuk Buku Induk Keuangan Perkara Perdata telah di isi sesuai dengan petunjuk yang ditutup setiap bulannya oleh Panitera diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Buku Induk keuangan perkara perdata dilakukan pemeriksaan oleh Ketua sekali 3 (tiga) bulan dibuatkan berita acara dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI. Buku Penerimaan uang hak-

hak kepaniteraan telah di isi sesuai dengan petunjuk yang ditutup setiap minggu oleh Panitera dan disetorkan kepada bendahara penerima dan dilaporkan setiap bulannya oleh bendahara penerima.

Laporan-laporan

Laporan bulanan terdiri dari :

- Laporan keadaan perkara, Laporan keuangan perkara, laporan jenis perkara.
- Laporan Kwartal terdiri dari :
- Laporan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan eksekusi.
- Laporan Semester adalah Laporan tentang kegiatan hakim perkara pidana dan perdata ;

Pemberkasan dan minutasi

Penyelesaian perkara sejak diterima, diputuskan dan diminutasi sudah selesai 6 bulan kecuali ada suatu perkara susah pembuktian yang belum diputus tetapi kami telah melaporkan ke Pengadilan Tinggi. Pembundelan berkas perkara disusun menurut petunjuk dan disediakan ruangan untuk Arsip perkara;

• Perkara Pidana

Prosedur penerimaan perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, pidana cepat/Lalu lintas sudah dilakukan oleh panitera muda pidana sesuai petunjuk.

Mengenai perkara pidana biasa yang dlimpahkan oleh penuntut umum melihat penahanannya. Apabila penahanan hampir habis maka cepat dilaporkan kepada Ketua untuk dikeluarkan Penetapan perpanjangan penahanan;

Buku Register .

Buku Register Pidana terdiri dari :

- Buku Induk Pidana Perkara Biasa
- Buku Induk Pidana Perkara Singkat
- Buku Induk Pidana Perkara Cepat/LLAJ dan Ringan
- Register Induk Perkara Pidana Singkat Anak
- Register Induk Perkara Pidana Biasa Anak
- Register Induk Perkara Tindak Pidana Ringan Anak
- Register Permohonan Grasi Perkara Pidana Anak
- Register Perkara Pidana Anak Korban dan Anak Saksi

- Register Permohonan Kasasi Perkara Pidana Anak
- Register Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Anak
- Register Permohonan Perkara Banding Anak
- Buku Register Penahanan
- Buku Register Izin penetapan /Pengeledahan
- Buku Register Ijin Persetujuan Penyitaan/Penyitaan
- Buku Register Barang Bukti
- Buku Register Banding
- Buku Register Kasasi
- Buku Register Peninjauan Kembali
- Buku Register Grasi/Remisi
- Buku Register Anak
- Buku Register Korban Anak
- Buku Register Diversi telah diisi menurut ketentuan.

Keuangan perkara pidana

- Uang bantuan hukum selama Tahun 2025 Rp. Nihil
- Uang jaminan penanguhan tahanan Tahun 2025 Rp. Nihil. ,
- Uang titipan barang bukti Tahun 2025 sejumlah Rp. Nihil

Laporan–laporan

Laporan bulanan pidana terdiri dari :

- Laporan perkara pidana, laporan jenis perkara pidana

Laporan Kwuartal (empat bulanan) terdiri dari :

- Perkara pidana yang dimohonkan banding
- Perkara pidana yang dimohonkan kasasi
- Perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali
- Perkara pidana yang dimohonkan grasi/remisi

Laporan Semester (enam bulanan) terdiri dari :

- A. Laporan tentang kegiatan Hakim perkara pidana
- B. Laporan pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan pengamat

Laporan-laporan tersebut telah dilaksanakan menurut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberkasan dan minutas

Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II sebahagian yang telah diputus dan diselesaikan sebelum 6 (enam) bulan kecuali perkara yang menarik perhatian dan sudah dijilid berkasnya yang tata cara susunannya sesuai dengan ketentuan Pembundelan berkas perkara disusun menurut petunjuk dan disediakan ruangan untuk Arsip perkara.

1. Administrasi umum

- A. Surat menyurat sudah kami bukukan surat masuk dan keluarnya dan langsung difilekan menurut jenis surat tersebut dan sekiranya ada surat yang masuk berupa rahasia harus disimpan atau diberikan ke Ketua Pengadilan.
- B. Mengenai inventaris adanya KIB (Kartu Inventaris Barang) adanya mengenai tanah, gedung dan bangunan alat angkutan bermotor, adanya DIR (Daftar Inventaris Ruangan), DIL (Daftar Inventaris Lainnya).
- C. Adanya Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, keseluruhannya telah kami isi dan kami laporkan menurut ketentuannya.
- D. Adanya kebersihan kantor dikelola oleh Kasubbag Umum dengan Hakim Pengawas umum setiap sebulan sekali untuk bergotong royong.
- E. Adanya ruang perpustakaan.

Ada beberapa buku register, pengelompokan dan pinjaman buku dan register tersebut telah kami kelola dan diberi nomor kode setiap buku yang ada berdasarkan petunjuk dan sebagian besar sudah diberi katalog.

Administrasi Kepegawaian

Yaitu adanya buku induk pegawai/buku register pegawai, file pegawai, buku kendali (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun), kartu data pegawai, statistik pegawai dan telah diisi menurut ketentuan

Adanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), cara penilaiannya dimana Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II menilai Hakim dan Panitera/Sekretaris, sedangkan Panitera/Sekretaris menilai Panitera Pengganti dan staf serta Kasubbag atau Panmud yang belum mempunyai Surat Keputusan dari Dirjen Mahkamah Agung RI (SK yang divenitif).

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sudah diisi menurut ketentuan. Mengenai kenaikan pangkat dan gaji berkala (KGB) telah diusulkan serta dibuatkan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) terhadap penambahan gaji pegawai yang bersangkutan. Kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II telah dibentuk Koperasi simpan pinjam, tiap pegawai telah memiliki Kartu Kesehatan (ASKES), dan setiap pegawai telah memiliki kartu TASPEN dan apabila seorang pegawai ada yang meninggal dunia telah diajukan untuk pembayaran TASPENnya, sebahagian pegawai telah memiliki kartu istri (Karis) dan kartu suami (Karsu) untuk seluruh hakim maupun pegawai telah diberikan cuti tahunan, cuti alasan penting penting dan juga cuti hamil. Pengisian jabatan telah kami usulkan yang mana belum dikabulkan. Untuk kesehatan telah diadakan senam dan olahraga bola volly satu kali dalam seminggu.

Administrasi keuangan

Buku kas umum keuangan telah kami isi sesuai petunjuk dan menurut ketentuan yang berlaku dan ditutup oleh bendahara pengeluaran diketahui oleh Panitera dan membuat laporan SAI setiap bulan berdasarkan pemasukkan dan pengeluaran, telah dibuatkan daftar gaji seluruh hakim dan pegawai dan telah dimintakan mengenai uang honor tetap, uang makan di dalam DIPA dan telah kami buat tiap bulannya surat SPP, SPM atau surat-surat yang berhubungan dengan GU, uang yang diminta telah kami keluarkan dan pembuktiannya berupa kwitansi dan juga telah kami buat RKA-KL untuk Tahun 2025.

Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan

Perencanaan Anggaran yang dilakukan setiap akhir tahun untuk tahun berikutnya telah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa pengadaan yang masih belum bisa terealisasi karena adanya pemotongan anggaran dari Mahkamah Agung.

Untuk server dengan SIPP telah di *Upgrade* sesuai dengan versi terbaru Mahkamah Agung 5.6.4, untuk penggunaan jaringan kantor sudah cukup bagus, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum ada pembagian data pada jaringan. Pelaporan secara berkala telah berjalan dengan baik dan dengan koordinasi yang lancar dari setiap pihak sehingga setiap laporan dapat tersusun dengan baik dan benar.

BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II sebagaimana termuat dalam uraian sebelumnya, maka dapat kami simpulkan bahwa secara umum seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan apa yang telah digariskan. Mata Anggaran Tahun 2025 telah direalisasikan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana terlampir dalam laporan ini, namun demikian Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II tetap memberikan kesempatan terhadap tindakan koreksi dan perbaikannya di kemudian hari.

B. REKOMENDASI

Sesuai dengan isi laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebagaimana teruat dalam uraian sebelumnya, maka dalam menghadapi tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Sidikalang berharap ada perbaikan sehingga dapat menunjang sistem sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II belum memiliki Tenaga Pranata Komputer, Pustakawan dan Penata Laporan Keuangan serta kekurangan staf di beberapa bidang, mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II.
2. Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer kadang bertumpu pada satu orang mohon diadakan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan misal untuk aplikasi SIPP, Komdanas, LPSE, SIKEP, direktori putusan dan lain-lain.
3. Kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang ada pada Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II sudah mulai tua yang manfaatnya sudah berkurang mohon tahun 2025 bisa disediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 ini dibuat dan disampaikan semoga bermanfaat bagi Pengadilan Negeri Sidikalang Kelas II guna untuk peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas kedepan yang lebih baik, sehingga pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan dapat terwujud.